

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum pidana 1 Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hokum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana

Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindunagn Korban Kejahatan antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Eddy Djunaidi Karnasudirdja. 1983. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: SN

Gatot Suparmono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Hari Sasangka, Dkk. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta

John Braithwaite. 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press

Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair. 2010. *System Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut KUHP Baru*. Medan: USU Press

Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional

Soedjono D. 1977. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni

Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Tumbur Palti D. hutapea, Dkk. 2020. *Rekonstruksi ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

B. Jurnal

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, 2018, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Al'Adl, Vol. 10 No. 2 Juli 2018, hlm. 177

Modul Asesmen Dan Rencana terapi Gangguan Penggunaan Narkotika Edisi Revisi 2014, Direktorat Bina Kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan RI

Modul Asesmen Dan Rencana terapi Gangguan Penggunaan Narkotika Edisi Revisi 2018, Direktorat pencegahan Dan Pengendalian Napza, Kementerian Kesehatan RI

Adi Andoyo Soetjipto., 1984, Kesamaan Dalam Pemidanaan (Parity in Sentence), Lokakarya tentang Pemidanaan Dalam Munas IKAHI ke-VIII, Jakarta, 27-29 Maret 1984

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republic Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, nomor : PER-005/A/JA/03/2014, nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau terdakwa pecandu
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi
Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang
Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau
Telah Mendapatkan Penetapan Pengadilan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana
Prekursor Narkotika

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif
Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif